

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Busro, Abud Bakar Busro dan Abu Daud, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- D, Moh. Mahfud M, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 2001, Cet. I,
- D, Riant Nugroho, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media, 2000
- Djohan, Djohermansyah, *Kebijakan Otonomi Daerah 1999*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2003
- Fahmal, A. Muin *Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII-Press, Jogjakarta, 2006
- Fukuyama, F., *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Penerjemah A. Zaim Rofiq, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Gaebler, David Osborne dan Ted, *Mewirausahakan Birokrasi, Mentransformasi Semangat Wirausaha Dalam Sektor Publik*, diterjemahkan oleh, Abdul Rosyid, dari judul, *Reinventing government, how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*, Jakarta: PPM, 2005, cet. VIII
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1992
- Hoessein, Benyamin, “Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara”, Jakarta: LAN, 2001
- Huberman, Matthew B. Miles dan A. Michael, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992
- Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmailly, Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH-UI, 1983
- Islamy, Irfan, *Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, cet.ke-13
- Jimung, Martin, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif tonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Nusatam, 2005

- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Kartasapoetra, R.G. *Sistematika Hukum Tatanegara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003
- Manan, Bagir, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- \_\_\_\_\_, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH-UII, 2001
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002
- Muslimin, Amrah, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1982
- Prianto, Agus *Menakar Kualitas Pelayanan Publik*, Malang: Intrans Publishing, 2005,
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, cet, ke-15
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Tatanegara di Indoensia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1983
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999
- Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar, Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan, kondisi dan tanatanganya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Setiyono, Budi, *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi*, Semarang, Puskodak FISIP UNDIP, 2004,
- Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Soejito, Irwan, *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemda*, Jakarta: Bina Aksara, 1981
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Sukriono, Winardi Sirajuddin dan Didik, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang, Stara Press, 2011

Supriana, Tjahya, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993

Surachmad, Winarno, *Dasar-dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1975

Thoha, Miftah, *Prilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 112. dan Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Wasistiono, Sadu, *Kapita Selekta manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alqaprin Jatinangor, 2001

Wahjono, Padmo, *Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

\_\_\_\_\_, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980

Widjaja, A.W., *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998

Ratminto dan Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Yuslim, "Tinjauan tentang Konsepsi Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah yang Nyata, Dinamis dan Bertanggung Jawab", *Tesis*, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung 1987

Zakaria, Noer Fauzi dan R.Yando, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST "Press", 2000

## B. MAKALAH

Hoesein, Bhenyamin, *Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945*, BPHN dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003

Mohammad, Ismail, *"Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat"*, Makalah, disampaikan dalam Diskusi Panel Optimalisasi Peran PNS pada Pelaksanaan Tugas Pokok sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang diselenggarakan oleh Unit KORPRI POLRI, Jakarta, 23 Oktober 2003

R, Mustopadjaja A, "Kompetensi Aparatur Dalam Memikul Tanggung Jawab Otonomi Daerah Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia", Ceramah Perdana Pada Program Magister Manajemen

Pembangunan Daerah, Kerjasama STIA-LAN, Pemerintah Prov. Kaltim dan Universitas Mulawarman, Samarinda, 15 Januari, 2002

Suprijadi, Anwar, “ *Kebijakan Peningkatan Kompetensi Aparatur Dalam Pelayanan Publik*”, Disampaikan pada Peserta Diklatpim Tingkat II Angkatan XIII, Jakarta, 19 Juli 2004

### C. UNDANG-UNDANG

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Standar Minimal Pelayanan Publik

Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2012 tentang Badan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan

Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2007 tentang Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan

Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN /7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

### D. INTERNET

<http://bpmdppt.bungokab.go.id/?v=pr&id=243>